

Mewaspadaai Politisasi Agama

Fawaizul Umam*

Dalam hampir setiap hiruk-pikuk perhelatan politik praktis, politisasi agama adalah fenomena klise. Sangat mungkin fenomena serupa akan kembali marak di hajatan Pilkada 2018 dan juga momen Pilpres di tahun depan. Tulisan ini tidak hendak mengukur seberapa besar potensi politisasi agama menjelang momen politik praktis itu, melainkan lebih menyoal kegilaan para politisi dalam mengeksploitasi simbol dan anasir agama demi mendulang dukungan politik.

Hal itu penting disoal mengingat dampak destruktif dari politisasi agama bagi kohesivitas sosial masyarakat Indonesia yang begitu multikultural. Pilkada DKI tempo hari menjadi pelajaran penting betapa politisasi agama bisa berlangsung sangat brutal dan dalam banyak hal mampu mengoyak tenunan kebangsaan kita secara nasional. Itulah mengapa kita patut mewaspadaai setiap tendensi politisasi agama seraya berharap hal tersebut tidak bakal terjadi di berbagai daerah, termasuk di Jawa Timur yang kini juga tengah menyongsong Pilkada serentak 2018.

Relasi Absurd

Praktik politisasi agama sendiri hanyalah salah satu bentuk paling banal dari diskursus relasi agama dengan politik. Praktik tersebut jelas mengabaikan fakta betapa fenomena perselingkuhan agama dengan politik kerap kali justru mendistorsi entitas pertama. Alih-alih politik melayani cita dan kepentingan jangka panjang agama, yang terjadi justru agama dieksploitasi habis-habisan untuk melayani kepentingan dan hasrat kuasa para politisi. “Sebagian besar sejarah (politik) Islam adalah sejarah para despot yang mengklaim berkuasa atas nama Tuhan,” ujar el-Affendi (1994), seorang filosof Sudan, saat menyinggung sejarah getir perselingkuhan Islam dan politik.

Menyandingkan agama dan politik dengan spirit politisasi sejatinya langkah *absurd* dan juga beresiko karena keduanya adalah entitas berbeda. Agama adalah entitas sakral, sedangkan politik adalah praksis profan. Memanfaatkan agama dalam rangka *politicking* jelas akan mendistorsi sakralitas agama dan membuatnya terhenti sekedar sebagai komoditas; pada saat yang sama juga mendegradasi kualitas demokrasi karena praksis politik akan terus menerus dihantui tendensi primordial dan bukan kalkulasi rasional.

Itulah yang bakal selalu muncul mengiringi tindak politisasi agama, terutama jika paradigma para pelaku masih formalistik dalam memandang relasi agama dengan politik. Dengan logika mendahulukan formalitas *wadah* daripada *isi*, paradigma ini memandang simbolisme keagamaan sebagai hal terpenting untuk ditampilkan. Dalam setiap upaya aktualisasi keyakinan keagamaan (*religious belief*) ke dalam aksi politik (*political action*), para penganjurnya akan lebih memilih melakukan politisasi agama (Liddle, 1998).

Untuk konteks Indonesia yang bukan negara agama dan masyarakatnya yang begitu plural dan bahkan multikultural secara agama, politisasi agama jelas kontraproduktif bagi proses demokratisasi. Hal ini berkait dengan watak paradigma formalistik itu sendiri, yaitu eksklusif. Eksklusivitas lekat dengan kecenderungannya dalam memonopoli kebenaran (Panikkar, 1994) sehingga seluruh anasir di luarnya dinegasikan. Dan itu jelas bentuk pengingkaran konkrit terhadap salah satu pilar penyangga demokrasi, egalitarianisme.

Menggeser Paradigma

Sebenarnya menyandingkan agama dengan politik bukan berarti terlarang. Yang terpenting adalah menggeser paradigmanya, yakni dari formalistik menuju substantivistik. Dalam hal ini politisasi agama haruslah dimaknai sekaligus dijalankan dengan strategi substantiasi nilai-nilai agama (Islam), seperti keadilan (*al-'adalah*), kesetaraan (*al-musawah*), kebebasan (*al-hurriyah*), dan dialog (*al-shura*) ke dalam setiap praksis politik.

Dengan strategi substantiasi yang memandang *isi* lebih urgen ketimbang *wadah*, paradigma substantivistik potensial berkontribusi produktif bagi proses demokratisasi. Dalam konteks penyelenggaraan politik, ia tidak mempersoalkan bagaimana format formalnya, tetapi lebih memusatkan perhatian pada bagaimana mengisinya dengan etika dan spirit moral agama. Secara paradigmatis, proses aktualisasi *religious belief* menuju *political action* dilakukan dengan cara substantiasi nilai-nilai fundamental agama tadi ke dalam praksis politik. Terbangunnya struktur politik yang kental ditandai formalisme-simbolisme agama, dengan demikian, bukanlah cita utamanya.

Untuk itu, dalam konteks politik praktis, para politisi Muslim hendaknya mulai berhenti memainkan sentimen primordialisme keagamaan untuk menangguk dukungan. Sementara itu, umat atau masyarakat harus mulai belajar untuk menanggalkan formalisme keagamaan sebagai preferensi utama dalam memberikan dukungan politik.

Dalam memilih pemimpin, misalnya, pertimbangan utamanya haruslah didasarkan bukan pada formalisme kepegangan agama si calon, melainkan pada kalkulasi rasional

menyangkut kualifikasinya, seperti memiliki integritas terpuji, kapabilitas memadai, akseptabilitas merata, dan elektabilitas tinggi. Sebab, kepegangan agama dan ketaatan religius secara simbolik tidak selalu berkorelasi positif dengan kesalahan. Betapa banyak politisi Muslim tetapi perilakunya tidak islami.

Demikian juga memilih parpol tidak harus yang secara formal mendaku “partai Islam” atau “partai dakwah”, tetapi yang terpenting berperilaku islami. Alangkah banyak parpol yang mengaku “partai Islam” atau berspirit “dakwah” tetapi tindakan politiknya justru kerap mencederai nilai-nilai Islam.

Di titik itulah keterpenuhan nilai-nilai agama, bukan kepegangan formal agama, harusnya menjadi preferensi utama dalam mengekspresikan setiap pilihan politik di ruang publik. Cukuplah *quote* masyhur dari Gus Dur jadi pegangan kita, “Tidak penting apa pun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah tanya apa agamamu atau sukumu”.

Jadi, kesadaran berpolitik sedemikian jelas lebih pas untuk Indonesia yang majemuk. Memainkan agama sebagai instrumen politik sungguh tidak mendidik, terkhusus bila formalisme dikenakan sebagai paradigma. Sebab, hal itu tidak hanya mendistorsi nilai-nilai agama, tetapi juga mendelegitimasi nilai-nilai demokrasi. Menghindari politisasi agama dalam praksis politik niscaya memudahkan jalan bagi kita mewujudkan nilai-nilai agama sekaligus menjaga kualitas demokrasi di tengah kebhinnekaan masyarakat Indonesia yang begitu multikultural. Semoga![]

*) *Dosen Fisafat Agama
Pascasarjana IAIN Jember*